

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hikmawanti, Fenti. *Metode Penelitian, Cetakan ke-4*. Depok : Rajawali Pers, 2020.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media. 2018.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-38*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : STPN Press, 2022.

Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Sinar Grafika. (2018).

Soekanto, S., dan Mamuji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok : Rajawali Pers, 2022.

Suteki, Taufani Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Simanjuntak, E. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi & Refleksi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Yanto, Nur. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media. (2015).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal

Arauf, Muhammad, and H. B. Gusliana. *"Penerapan Ganti Rugi terhadap Warga Masyarakat Akibat Perbuatan Melanggar Hukum*

- Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.*" Riau Law Journal 7.2 (2019): 231-247.
- Aschari, M., and Fransisca Romana Harjiyatni. "Kajian tentang kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan Fiktif positif." Jurnal Kajian Hukum 2.1 (2017): 25-57.
- Bunga, Marten. *"Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah."* Gorontalo Law Review 1.1 (2018): 39-49.
- Effendi, Maftuh. *"Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara."* Jurnal Hukum dan Peradilan 3.1 (2018): 25-36.
- Indrawan, Dinda Putri, Lego Karjoko, and Rosita Candrakirana. *"Prinsip Keadilan Kompensatoris Dan Keadilan Distributif Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta."* YUSTISI 11.1 (2024): 81-93.
- Muslih, Mohammad. *"Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)."* Legalitas: Jurnal Hukum 4.1 (2017): 130-152.
- Putrijanti, Aju. *"Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 30/2014 tentang administrasi*

pemerintahan." Masalah-Masalah Hukum, e-journal Undip 44.4 (2015): 425-430.

Ridwan, H. R., Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. *"Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25.2 (2018): 339-358.

Riza, Dola. *"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan."* Jurnal Bina Mulia Hukum 3.1 (2018).

Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). *"Menekuni Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Pursue, State Administrative Court."* Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 40-44.

Sugara, Abi, and Arif Wibowo. *"Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara, Sistem Tata Negara."* Jurnal Penelitian Multidisiplin 1.2 (2022): 110-116.

Sukmanagara, Valentino Dandi, Lapon Tukan Leonard, and Kartika Widya Utama. *"Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan Ptun Jayapura No: 11/G/2017/PTUN. JPR)."* Diponegoro Law Journal 10.4 (2021).

Tampubolon, Faadhilah Aurelia Wirhartati, and Difa Salsabila.

"Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/Ptun-Bna." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.11 (2023): 722-734.

Wahyunadi, Yodi Martono. *"Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."* Jurnal Hukum dan Peradilan 5.1 (2016): 135-154.